

BAB I

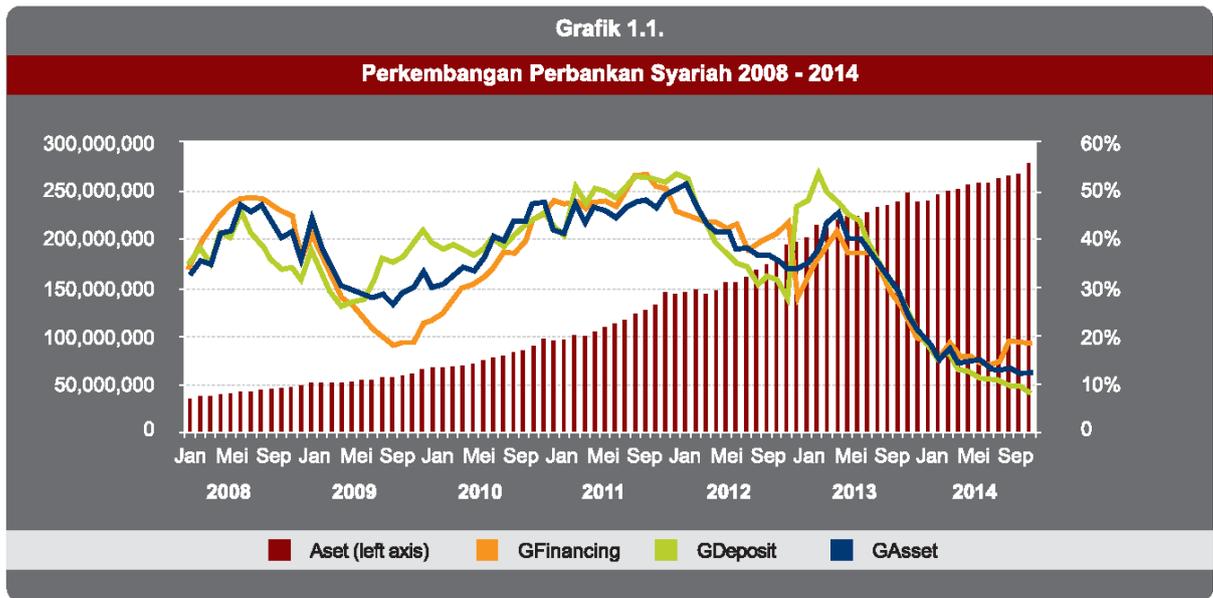
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan syariah nasional dalam dekade terakhir terus menunjukkan derap pertumbuhan yang positif dan cukup menggembirakan yang tercermin dari volume usaha yang terus tumbuh, dana investasi dan dana titipan masyarakat serta penyaluran pembiayaan yang terus meningkat. Adanya perkembangan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup penting dalam aktivitas perekonomian di Indonesia.

Namun demikian di tengah pertumbuhan positif industri perbankan syariah yang cukup menggembirakan tersebut dengan peningkatan rata-rata sekitar 33.2% dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, terlihat adanya fenomena pelambatan pertumbuhan volume usaha dalam perkembangan di tiga tahun terakhir sehingga pada akhir tahun 2014 hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 12% sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.1. mengenai grafik perkembangan perbankan syariah.

Pelambatan ini perlu diwaspadai dan dicermati faktor-faktor mendasarnya atau isu-isu strategis apa saja yang menyebabkan terjadinya pelambatan pertumbuhan tersebut, sehingga dapat diantisipasi secara memadai oleh otoritas, industri dan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memulihkan kembali pertumbuhan perbankan syariah yang tinggi disertai kegiatan usaha yang sehat dalam rangka mendukung kelancaran jasa keuangan.



Gambar 1.1. Grafik Perkembangan Perbankan Syariah 2008-2014

Saat ini, perbankan syariah sedang berlangsung proses konsolidasi dan menemukan kembali (*reinventing*) model bisnis yang lebih tepat dalam menyikapi kondisi perekonomian yang melambat pada 2014 – 2015 (awal), sekaligus diharapkan memperoleh kembali momentum pertumbuhan perbankan syariah nasional kedepan seperti yang terjadi pada periode sebelumnya. Dalam perkembangannya walaupun secara pangsa pasar industri perbankan syariah nasional masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, namun selama beberapa tahun terakhir terdapat beberapa pencapaian dan penghargaan internasional yang telah diperoleh Indonesia terkait perbankan dan keuangan syariah antara lain (i) Indonesia bersama dengan negara muslim lain seperti Qatar, Saudi Arabia, Malaysia, United Arab Emirates (UAE) dan Turki, atau dikenal dengan istilah QISMUT, diproyeksikan *..will be the driving factors behind the next big wave in Islamic finance in the world..* (Ernst & Young, *World Islamic Banking Competitiveness Report: 2013 - 2014*), (ii) Indonesia bersama dengan UAE, Arab Saudi, Malaysia dan Bahrain dianggap saat ini berada dalam posisi *to offer lessons* kepada negara lain di dunia untuk pengembangan keuangan syariah (*Global Islamic Finance Report, UK: 2013*) dan (iii) OJK menerima penghargaan sebagai *The Best Regulator in Promoting Islamic Finance* (*Islamic Finance News, Malaysia: 2014*).

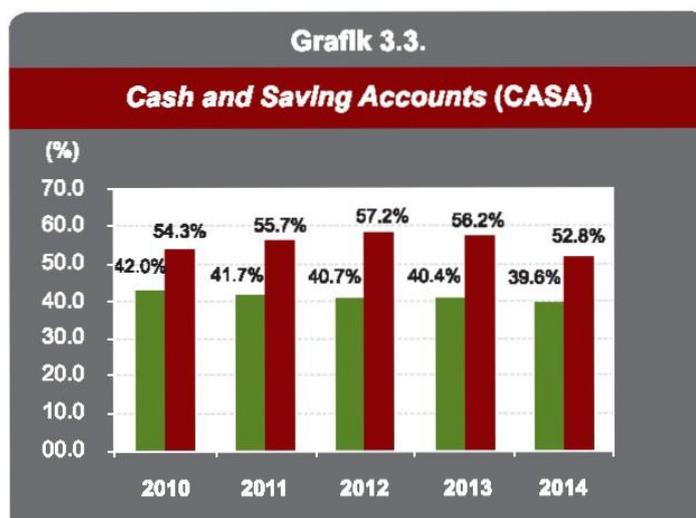
Berdasarkan *Road Map* Perbankan Syariah Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015, ada beberapa isu strategis yang dihadapi dan berdampak signifikan terhadap pengembangan perbankan syariah nasional, isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.1.1. Modal yang belum memadai, skala industri dan individual bank yang masih kecil serta efisiensi yang rendah

Kondisi permodalan yang terbatas merupakan faktor penting yang mempengaruhi rendahnya ekspansi aset perbankan syariah. Dari 12 bank umum syariah (BUS), 10 BUS memiliki modal inti kurang dari Rp 2 triliun dan tidak ada BUS dengan modal inti melebihi Rp 5 triliun atau tergolong kategori BUKU 3. Selain itu, CAR BUS secara agregat mencapai 15,74% atau lebih rendah dari CAR rata-rata bank umum secara nasional. Dengan kondisi demikian, aset BUS dan UUS tercatat baru mencapai Rp 272,34 triliun pada Desember 2014. Dampaknya, bank-bank syariah menjadi kurang leluasa untuk membuka kantor cabang, mengembangkan infrastruktur, dan mengembangkan segmen layanan yang memiliki karakteristik risiko lebih bervariasi termasuk sejumlah layanan bank yang hanya dapat dilakukan oleh bank pada kategori BUKU 3 dan 4 seperti kustodian, *digital money* dan *trustee*

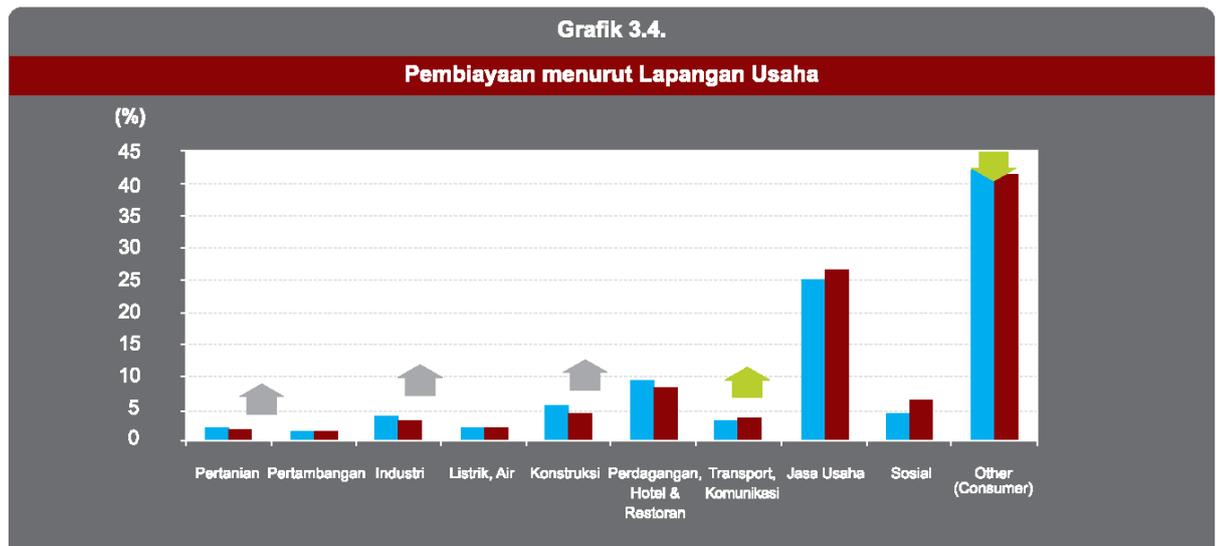
1.1.2. Biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan

Seiring dengan keterbatasan permodalan, secara umum model bisnis perbankan syariah fokus pada segmen ritel termasuk UMKM dan konsumen. Intensitas kompetisi yang tinggi di segmen tersebut memerlukan dukungan infrastruktur berupa jaringan kantor dan ATM/POS yang luas dan teknologi informasi yang handal, yang mana tidak dimiliki sebagian besar bank-bank syariah. Dengan kondisi demikian, struktur pendanaan perbankan syariah secara umum belum seefisien bank umum konvensional (BUK), yang tercermin dari komposisi *cash accounts and saving accounts* (CASA) yang lebih rendah sebagaimana terlihat dalam Grafik CASA berikut ini.



Gambar 1.2. Grafik Perkembangan *Cash and Saving Account*

Dengan kondisi tersebut, maka kapasitas pembiayaan perbankan syariah baru dapat dioptimalkan untuk sektor ritel dan *consumer* (sebagaimana terlihat dalam grafik pembiayaan menurut lapangan usaha) yang menawarkan margin relatif terbatas, yang tercermin dari rasio BOPO yang relatif tinggi dan ROA yang relatif rendah dibandingkan BUK. Perluasan portfolio pada segmen ritel khususnya UMKM juga masih terkendala oleh jumlah dan lokasi outlet yang relatif terbatas. Sementara, ekspansi ke segmen komersial dan korporasi selain terkendala ukuran modal, juga cukup berisiko mengalami *adverse selection* karena inefisiensi struktur dana, disamping masih terbatasnya pengalaman dan kemampuan pengelolaan risiko pada segmen dimaksud yang tidak lagi terbatas pada *credit risk*.



Gambar 1.3. Grafik Pembiayaan Menurut Lapangan Usaha

1.1.3. Produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat

Dalam tahap perkembangannya saat ini, variasi produk dan layanan perbankan syariah cukup berkembang, terutama pada segmen ritel termasuk UMKM, dan konsumen. Inovasi produk melalui pengaplikasian prinsip syariah yang unik juga mulai berkembang misalnya produk berbasis *rahn* dan *ijarah*. Meski demikian, penerimaan oleh masyarakat belum sebaik pada produk BUK antara lain karena faktor fitur yang belum selengkap produk serupa di BUK. Keterbatasan kelengkapan fitur layanan produk yang ditawarkan perbankan syariah juga dipengaruhi oleh kategori kegiatan usaha (BUKU) bank syariah yang saat ini hanya meliputi BUKU 1 dan BUKU 2, sehingga belum dapat mengembangkan produk/aktivitas seperti bank kustodian, *digital money*, dan *trusty* yang hanya dapat ditawarkan oleh Bank BUKU 3 dan BUKU 4. Selain itu, terdapat harga dan kualitas layanan yang belum setara dengan BUK, serta faktor akses dan pengenalan nasabah yang masih terbatas. Keberadaan faktor-faktor tersebut, di samping faktor komunikasi dan sosialisasi yang kurang tepat, juga menimbulkan *gap* ekspektasi, termasuk dalam aspek ke-syariah-an produk, sehingga masyarakat tidak melihat insentif untuk beralih pada produk perbankan

syariah.

Selain itu, sejalan dengan tuntutan perluasan portfolio dana dan pembiayaan perbankan syariah pada aktivitas bernilai tambah tinggi atau sektor yang strategis bagi penguatan perekonomian nasional, perbankan syariah ditantang untuk lebih mendiversifikasi produknya. Pengembangan produk perbankan syariah kedepan diharapkan mampu menciptakan outlet-outlet investasi bagi nasabah khususnya kelas menengah ke atas, menambah variasi produk pembiayaan mikro, dan mengembangkan produk pembiayaan korporasi, *trade finance*, produk pengelolaan kas dan/atau *fund management*, *start up financing*, serta produk - produk *development financing* khususnya untuk pembangunan infrastruktur.

- 1.1.4. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai serta Teknologi Informasi (TI) yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan

Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia ditujukan terhadap seluruh pihak yang berperan aktif dalam pengembangan dan operasional perbankan syariah, yang antara lain meliputi: pengelola bank syariah, pengawas bank syariah, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan pihak peradilan yang menangani sengketa di perbankan syariah. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM ini akan sangat mempengaruhi upaya pengembangan bidang lainnya seperti pengembangan produk dan layanan, serta pengembangan TI.

Berkembang pesatnya industri perbankan syariah setelah dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008, telah memicu kebutuhan akan tenaga kerja yang sangat besar. Selanjutnya, dengan semakin berkembangnya industri perbankan syariah sejalan dengan perkembangan industri perbankan nasional yang semakin kompetitif, juga semakin meningkatkan kebutuhan akan SDM yang berkualitas. Disadari bahwa terdapat tantangan tersendiri dalam pemenuhan SDM perbankan syariah. Selain dibutuhkan pengetahuan mengenai bisnis

perbankan dan keuangan, SDM perbankan syariah juga dituntut memahami prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, perbankan syariah juga harus bersaing dalam mendapatkan SDM yang berkualitas dengan perbankan konvensional yang secara umum memiliki kapasitas lebih baik dalam menarik minat calon pegawai.

Pengembangan kualitas SDM perbankan syariah bukan hal yang mudah. Diperlukan waktu yang panjang dan upaya yang terus menerus untuk dapat melahirkan bankir syariah yang berkualitas.

Mengingat pesatnya pertumbuhan perbankan syariah dan industri keuangan syariah lainnya, upaya memenuhi kebutuhan SDM ini harus dimulai dari penyiapan pemasok utama tenaga kerja, yaitu perguruan tinggi atau bahkan lembaga pendidikan pada level-level sebelumnya.

Upaya peningkatan kualitas SDM di industri perbankan telah mengalami kemajuan yang menggembirakan dengan telah tersedianya berbagai pelatihan dan sertifikasi profesi yang terstruktur. Namun untuk perbankan syariah, upaya ini baru dimulai dengan memperkenalkan pengetahuan dasar perbankan syariah. Ke depan upaya ini akan terus dilakukan dengan memasukan kompetensi di bidang perbankan syariah pada level yang lebih tinggi.

Di dunia perbankan modern, TI dituntut bukan lagi hanya sebagai aktivitas pendukung dalam suatu aktivitas keuangan, tetapi sudah harus berevolusi menjadi *business driver*. Kemampuan penetrasi TI yang baik, telah terbukti mampu meningkatkan daya saing dan keuntungan bagi bank dan nasabahnya. Nasabah diuntungkan dengan kemudahan operasional perbankan yang hampir tanpa batas. Sementara itu, bagi bank terbukti mampu menjadi daya tarik dalam akuisisi nasabah (*customer acquisition*) dan mampu menekan *operational cost* serta meningkatkan *fee based income*.

Masih terdapat beberapa hal yang sering menjadi hambatan dan

permasalahan utama pengembangan TI di industri perbankan, termasuk perbankan syariah: pertama, kesadaran pemilik dan manajemen akan peran vital TI. Pemilik dan manajemen terkadang enggan memperhatikan biaya TI, karena masih beranggapan TI hanya merupakan *supporting*, bukan bisnis utama. Kedua, perencanaan yang kurang baik terhadap kebutuhan TI saat ini dan masa yang akan datang sesuai dengan rencana pengembangan bisnis sehingga bank sering mengalami permasalahan dalam pengadaan TI dan implementasinya. Ketiga, pengawasan operasional TI, termasuk tersedianya tenaga auditor TI yang handal.

Sebagai akibat dari kondisi tersebut, saat ini kemampuan TI perbankan syariah masih di bawah kebanyakan bank konvensional menengah dan besar, termasuk dibandingkan dengan kemampuan TI induk perusahaan dari masing-masing bank syariah. Hal ini pada akhirnya tentu saja akan membatasi kemampuan perbankan syariah dalam inovasi produk dan memperbaiki kualitas layanannya.

Sebagai respon terhadap beberapa isu strategis di atas, Pemerintah melalui kementerian BUMN menginisiasi melakukan sinergi dan konsolidasi BUMN sektor perbankan dan keuangan dengan membentuk perusahaan *holding* perbankan termasuk didalamnya adalah konsolidasi bank umum syariah yang dimiliki oleh Pemerintah melalui anak usaha Bank BUMN (*Organization Restructuring Stand Alone, Merger/Konsolidasi dan Holding, Rencana Startegis Kementerian BUMN 2015-2019*).

Pemerintah masih melakukan kajian model konsolidasi bank umum syariah yang di miliki oleh Pemerintah, apakah 3 bank umum syariah (Bank BNI syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah) dan Unit Usaha Syariah BTN akan di lebur/merger menjadi 1 atau 2 bank umum syariah atau masing-masing bank syariah berdiri sendiri dengan mencari investor strategis

dalam rangka memperkuat struktur modal, *enhance* sumber daya manusia dan teknologi serta memperluas jaringan kantor cabang dan meningkatkan kemampuan penggalangan dana pihak ketiga dalam dan luar negeri (*funding capacity*).

Sejalan dengan opsi yang akan diambil oleh Pemerintah dalam melakukan konsolidasi bank umum syariah yang dimiliki oleh Pemerintah, kajian akan tingkat kesehatan bank-bank umum syariah perlu dilakukan sehingga dapat memberikan gambaran model konsolidasi yang tepat untuk di pertimbangkan oleh Pemerintah sebagai model yang paling optimal dari hasil analisis kesehatan *existing* masing-masing bank umum syariah yang ada sekarang.

Berdasarkan POJK No 8/POJK.03/2014 bank umum syariah wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap factor-faktor sebagai berikut:

- a. Profil risiko (*risk profile*);
- b. *Good Corporate Governance* (GCG);
- c. Rentabilitas (*earnings*); dan
- d. Permodalan (*capital*).

Dalam penilaian kesehatan bank umum syariah tersebut mencakup dua aspek yaitu *financial aspect* (Rentabilitas dan Permodalan) serta *non financial aspect* (Profil risiko dan *Good Corporate Governance*). Tingkat kesehatan dan kinerja bank dapat dilihat dengan berbagai indikator. Salah satu indikator yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan terutama rasio-rasio yang terkait dengan Permodalan (CAR), Rentabilitas (ROE atau ROA dan BOPO atau OER), dan Profil Risiko (FDR dan NPF) serta lainnya.

Dalam POJK No 21/POJK.03/2014 diatur bahwa penyediaan modal minimum, sebagai berikut:

- a. Untuk Bank dengan Profil Risiko peringkat 1 paling rendah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- b. Untuk Bank dengan Profil Risiko peringkat 2 paling rendah 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- c. Untuk Bank dengan Profil Risiko peringkat 3 paling rendah 10 % sampai dengan kurang dari 11% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- d. Untuk Bank dengan Profil Risiko peringkat 4 paling rendah 11% sampai dengan 14% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Definisi dan kriteria Profil Risiko Bank peringkat satu sampai dengan peringkat empat tertuang dalam SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014.

Berdasarkan laporan triwulan OJK untuk triwulan III tahun 2018, di ketahui bahwa sampai dengan September 2018 kinerja bank umum syariah masih belum memuaskan seperti terlihat pada tabel indikator perbankan syariah di bawah ini:

Tabel 1.1. Indikator Perbankan Syariah

| Indikator Utama | Triwulan | Triwulan | Triwulan | Pertumbuhan (qtq) Triwulan II-2018 | | Pertumbuhan (qtq) Triwulan III-2018 | | Pertumbuhan (yoy) Triwulan III-2018 | |
|------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| | | | | Nominal | % | Nominal | % | Nominal | % |
| BUS | | | | | | | | | |
| Total Aset BUS (Rp. T) | 275,95 | 294,32 | 306,12 | 0,05 | +0,02 | 11,80 | +4,01 | 30,18 | +10,94 |
| DPK (Rp. T) | 232,35 | 241,07 | 251,48 | -3,75 | -1,53 | 10,41 | +4,32 | 19,13 | +8,24 |
| Pembiayaan (Rp. T) | 186,15 | 189,68 | 198,54 | -0,39 | -0,20 | 8,86 | +4,67 | 12,38 | +6,65 |
| Jumlah NPF (Rp. T) | 8,21 | 7,27 | 7,59 | -1,40 | -16,18 | 0,32 | +4,43 | -0,62 | -7,55 |
| CAR (%) | 16,16 | 20,32 | 21,25 | - | +1,85 | - | +0,93 | - | +5,09 |
| NPF Gross (%) | 4,41 | 3,83 | 3,82 | - | -0,73 | - | -0,01 | - | -0,59 |
| ROA (%) | 1,00 | 1,37 | 1,41 | - | +0,14 | - | +0,04 | - | +0,41 |
| BOPO (%) | 91,68 | 88,75 | 88,08 | - | -1,16 | - | -0,66 | - | -3,60 |
| FDR (%) | 80,12 | 78,68 | 78,95 | - | +1,05 | - | +1,97 | - | -1,17 |
| Jumlah Kantor | 1.850 | 1.826 | 1.862 | 4,00 | 0,22 | -1882,00 | 1,97 | 12,00 | 0,65 |

Terlihat pada tabel di atas, pada September 2018 NPF bank umum syariah masih tinggi di 3,82%, BOPO juga tinggi di 88,08% dan FDR yang rendah di 78,95%.

Walaupun CAR bank umum syariah masih di atas 20%, tetapi ROA masih rendah di

1,41% dengan pertumbuhan jumlah pembiayaan dan dana pihak ketiga di bawah industri yaitu masing - masing untuk pembiayaan hanya tumbuh 6.65% (September 2018 YoY, industri 14%) dan dana pihak ketiga tumbuh 8,24% (September 2018 YoY industri 11%).

Kemudian berdasarkan laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan I tahun 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas di ketahui bahwa pada triwulan 1 tahun 2019 kinerja perbankan syariah masih lamban pertumbuhannya. Walaupun CAR perbankan syariah pada Maret 2019 di 20.30%, tetapi pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah hanya mencapai 11,99% , khusus untuk bank umum syariah tumbuh lebih rendah yaitu hanya 6,04%. Pada periode yang sama dana pihak ketiga perbankan syariah tumbuh 10,24%. Pada Maret 2019, NPF perbankan syariah di 3,4% dengan FDR sekitar 80%.

Penelitian ini hanya meneliti bank umum syariah yang di miliki oleh Pemerintah dan bank umum syariah swasta (Bank Mega Syariah). Bank-bank tersebut sudah mencantumkan laporan keuangannya secara terbuka sehingga analis, investor dan masyarakat secara transparan dapat mengetahui kinerja bank tersebut. Khusus untuk bank umum syariah yang dimiliki oleh Pemerintah, penelitian ini juga bisa dikaitkan kepada isu konsolidasi Bank-Bank Umum Syariah Pemerintah.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis serta hasil penelitian sebelumnya, maka judul penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh FDR, NPF dan OER Terhadap ROE serta Pengaruh ROE terhadap CAR Bank Umum Syariah”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perbankan syariah menghadapi isu strategis berupa permodalan yang belum memadai, biaya dana yang mahal, produk yang tidak variatif dan kuantitas serta

kualitas SDM beserta IT yang belum mumpuni.

2. Adanya kesiapan dari Pemerintah untuk merespon isu tersebut dalam bentuk kajian model konsolidasi bank umum syariah yang dimiliki Pemerintah; dan
3. Kebutuhan atas kajian tingkat kesehatan Bank-bank Umum Syariah yang dimiliki oleh Pemerintah, sehingga dapat memberikan gambaran model konsolidasi yang tepat untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan isu strategis yang sedang dihadapi perbankan syariah berupa permodalan yang belum memadai dan biaya dana yang mahal serta adanya kebutuhan kajian tingkat kesehatan atau kinerja Bank-bank Umum Syariah yang dimiliki Pemerintah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh FDR, NPF dan OER terhadap ROE serta pengaruh ROE terhadap CAR bank umum syariah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah FDR mempunyai pengaruh terhadap ROE pada bank umum syariah dari tahun 2011-2016 ?
2. Apakah NPF mempunyai pengaruh terhadap ROE pada bank umum syariah dari tahun 2011-2016 ?
3. Apakah OER mempunyai pengaruh terhadap ROE pada bank umum syariah dari tahun 2011-2016 ?
4. Apakah FDR, NPF dan OER secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap ROE pada bank umum syariah dari tahun 2011-2016 ?
5. Apakah ROE mempunyai pengaruh terhadap CAR pada bank umum syariah dari tahun 2011-2016 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap ROE pada bank umum syariah dari tahun 2011-2016 ?
2. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap ROE pada bank umum syariah dari tahun 2011-2016 ?
3. Untuk mengetahui pengaruh OER terhadap ROE pada bank umum syariah dari tahun 2011-2016 ?
4. Untuk mengetahui pengaruh FDR, NPF dan OER secara bersama-sama terhadap ROE pada bank umum syariah dari tahun 2011-2016 ?
5. Untuk mengetahui pengaruh ROE terhadap CAR pada bank umum syariah dari tahun 2011-2016 ?

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, untuk mengambil opsi model konsolidasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk mendapatkan struktur bank umum syariah yang paling sehat dan di harapkan dapat tumbuh kembang secara maksimal
2. Bagi calon investor strategis, untuk mengambil keputusan investasi pada saham bank umum syariah Pemerintah.
3. Bagi bank umum syariah dapat digunakan untuk mengetahui cara meningkatkan permodalan bank yaitu dari rasio-rasio keuangan yang ada yang berpengaruh terhadap CAR.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini dan sebagai pembanding hasil riset penelitian yang berkaitan dengan profitabilitas dan permodalan pada industri perbankan syariah.